

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2025**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas P3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya, tentu memiliki visi, misi dan tujuan strategis. Untuk mewujudkannya, maka ditetapkanlah dua sasaran kinerja yaitu tercapainya sistem akuntabilitas kinerja keuangan Perangkat Daerah dan meningkatnya sistem, prosedur dan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk mencapai ketiga sasaran kinerja tersebut, pada tahun anggaran 2025, Dinas P3AP2KB melaksanakan 9 (Semilan) Program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), diperoleh hasil sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 88,83%

Tambolaka, 22 Januari 2026



Kata Pengantar

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan Rahmat dan pimpinannya kami dapat menyajikan LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dengan baik. Walaupun kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyajian LKIP ini, tetapi dengan segala daya upaya kami lakukan untuk Penyempurnaannya.

Demikian kami sajikan LKIP DP3AP2KB ini, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Salam



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP	2
C. PROFIL BAGIAN ORGANISASI	3
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	7
BAB II PERENCANAANDAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. PERENCANAAN STRATEGIS	9
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023.....	10
C. RENCANA ANGGARAN.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. PROSES PENGUKURAN KINERJA	13
B. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA	14
C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	15
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	16
BAB IV PENUTUP	19
A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA	19
B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA	20
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
1. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023(RKT)	
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023(PK)	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas P3AP2KB. Dengan demikian, Dinas P3AP2KB merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Sebagai unit otonom, maka Dinas P3AP2KB diberi ruang untuk melaksanakan program / kegiatan strategis. Untuk melaksanakan program / kegiatan tersebut, maka dialokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran tersebut, wajib dipertanggungjawabkan secara transparan setelah tahun anggaran berjalan. Sarana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dasar acuannya Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Permen PAN-RB Bab IV Pasal 12, disebutkan LKIP adalah Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Pada Pasal 16 ayat 1, menyebutkan LKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran, sesuai ayat 2, sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas P3AP2KB;
 2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama;
 3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
-

4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, maka Dinas P3AP2KB wajib membuat LKIP Tahun 2022.

B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Tujuan dan manfaat pembuatan LKIP yang disampaikan di sini sesuai Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan pembuatan LKIP yaitu:

- a. Memberi pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran yang telah berjalan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dalam upaya mencapai visi dan misi.
- c. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan baik jangka pendek maupun menengah.

2. Manfaat

Manfaat pembuatan LKIP yaitu:

- a. Mendorong instansi pemerintah, unit Bagian Organisasi, untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan (dan pembangunan) secara baik dan benar (*good governance*).
 - b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.
 - c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
 - d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
-

C. PROFIL DINAS P3AP2KB

1. Struktur Dinas P3AP2KB

1. Kepala Dinas
2. Sekertaris Daerah :
 - a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana
3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana
4. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana
5. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana

Sedangkan Bagan struktur Organisasi Dinas P3AP2KB, sebagai berikut :



Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan	B	K	+/-
Praktik keperawatan dan Keperawatan	6	0	6
Analisis Keperawatan Ahli Madya	7	0	7
Praktik Nakes Ahli Madya	3	0	3
Praktik Perawatan Suku dan Kerukut Ahli Madya	2	0	2
Analisis Keperawatan Ahli Madya	1	0	1
Perencanaan Ahli Madya	1	0	1

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kelompok Jabatan Pelaksana

Jabatan	B	K	+/-
Logistik Organisasi	4	0	4
Pragmatisme	2	0	2
	0	0	0
	0	0	0

Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan	B	K	+/-
Analisis Keperawatan Ahli Perawatan	1	0	1
Analisis Keperawatan Ahli Madya	1	1	0
Perencanaan Ahli Perawatan	1	1	0
Perencanaan Ahli Madya	1	0	1

Kelompok Jabatan Pelaksana

Jabatan	B	K	+/-
Praktik Teknis	1	0	1
Praktik Data dan Informasi	1	0	1
	0	0	0
	0	0	0

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemasaran

Bidang Pengatur Urutan Gender

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sakinah

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan	B	K	+/-
Praktik keperawatan dan Keperawatan Perawatan	2	0	2
Praktik keperawatan dan Keperawatan Madya	2	2	0
Analisis Keperawatan Ahli Perawatan	1	1	
Analisis Keperawatan Ahli Madya	1	1	0

Kelompok Jabatan Pelaksana

Jabatan	B	K	+/-
Praktik Teknis Keperawatan [Perawatan Dukun Data Keperawatan]	3	0	3
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan	B	K	+/-
Analisis Keperawatan Ahli Perawatan	3	0	3
Analisis Keperawatan Ahli Madya	3	2	1
	0	0	0
	0	0	0

Kelompok Jabatan Pelaksana

Jabatan	B	K	+/-
Praktik Keperawatan Teknis [Analisis Keperawatan Keluarga]	3	0	3
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan	B	K	+/-
Praktik keperawatan dan Keperawatan Perawatan	2	0	2
Praktik keperawatan dan Keperawatan Madya	2	2	0
Analisis Keperawatan Ahli Perawatan	1	0	1
Analisis Keperawatan Ahli Madya	1	1	0
	0	0	0
	0	0	0

Kelompok Jabatan Pelaksana

Jabatan	B	K	+/-
Praktik Keperawatan Teknis [Perawatan Dukun Data Keperawatan]	3	0	3
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan	B	K	+/-
Praktik Nakes Ahli Perawatan	2	0	2
Praktik Nakes Ahli Madya	2	2	0
Praktik Perawatan Suku dan Kerukut Ahli Perawatan	2	0	2
Praktik Perawatan Suku dan Kerukut Ahli Madya	2	0	2

Kelompok Jabatan Pelaksana

Jabatan	B	K	+/-
Praktik Nakes Ahli Perawatan dan Perawatan Suku	2	0	2
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Husnulahi

Kepala Dinas Kesehatan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sumba Barat DayaRah. Sulastika T. S. Samani
Praktik Nakes Madya

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah keadaan Pegawai pada Dinas P3AP2KB. Sampai dengan Bulan Desember 2025, Pegawai pada Dinas P3AP2KB sebanyak 22 PNS orang dengan perincian sebagai berikut :

a. Menurut latar belakang pendidikan:

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Sarjana S 1	15 Orang
2	Diploma 3	4 Orang
3	SLTA	3 Orang
4	SD	-

b. Menurut golongan :

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan II	3 Orang
2	Golongan III	14 Orang
3	Golongan IV	5 Orang
4	Tenaga Kontrak	41 Orang

b. Menurut Diklat Penjenjangan dan Perencanaan yang diikuti :

No	Diklat Penjenjangan	Jumlah (Orang)
1	Pim III	3
2	Pim IV	2

c. Menurut Jabatan Struktural :

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	14

3. Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan prasarana perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran yang disampaikan disini terbatas pada keadaan Kendaraan operasional dan ekonomi produktif, sebagaimana disajikan berikut ini.

Keadaan sarana dan prasarana yang ada yaitu :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan		Barang
	a. Roda Empat	5 unit	dalam kondisikuran
	b. Roda Dua	69 unit	gbaik :
2	Komputer		1. 3 Buah Sepeda
	a. Komputer Intelpentium	1 unit	Motor
	b. Laptop	13 unit	Keadaankurang
	c. UPS	1unit	baik
3	Perlengkapan Kantor		2. Kursistaf4buah
	a. AC Panasonic	4 unit	3. UPS 2 unit
	b.Kamera	-----	4. 3 Unit Ac Rusak
4	Meubelair		
	a. Meja Biro	1 unit	
	b. Meja Setengah Biro	10 unit	
	c. Kursiputar	5buah	
	d. Kursipimpinan	1buah	
	e. Kursitamu	8 buah	
	f. KursikayuJati	10 buah	
	g. Lemari	12buah	
	h. Papan Stuktur	-----	
	i. Papan Informasi	-----	
	j. Papan Kipkir	-----	

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKIP

LKIP ini diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif, sebagai penuntun bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam Batang Tubuh LKIP.

Sedang Batang Tubuh LKIP dibagi dalam 4 (empat) bab yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LKIP, Profil Dinas P3AP2KB, dan Sistematisa Penyajian LKIP.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada Bab II ini menyajikan Perencanaan Kinerja yang meliputi Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Penetapan Tujuan, dan Penetapan Sasaran. Disamping itu, juga diuraikan tentang Rencana dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 serta Rencana Anggaran Tahun 2025

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan simpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN :

- PENGUKURAN KINERJA
- RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BAB II

PERENCANAAN PERJANJIAN KERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Pernyataan Visi

“ Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Keluarga Kecil, Bahagia Sejahtera, Menuju Sumba Barat Daya Yang Mauju Berdaya Saing Demokratis dan Sejahtera”

2. Pernyataan Misi

Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Dinas P3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan pada berbagai Bidang Kehidupan Stragis.
- b. Meningkatkan pelaksanaan dan memfasilitasi penguatan dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan Perempuan ;
- c. Terwujudnya Ketatalaksanaan organisasi, disiplin berpakaian dan disiplin kerja pegawai;
- d. Terpenuhi formasi jabatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi;

Terwujudnya kinerja organisasi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan *GoodGovenance* dan *Cleen Goverment*.

3. Penetapan Tujuan

Untuk melaksanakan misi tersebut di atas, maka ditetapkanlah tujuan strategis Dinas P3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut:

- a. Mewujudkan hasil penataan kelembagaan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
- b. Mengoptimalkan disiplin dan tertib aparatur.
- c. Meningkatkan pemanfaatan analisa formasi jabatan sesuai dengan beban kerja dan kompetensi jabatan .
- d. Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

4. Penetapan Sasaran

Dinas P3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 (Satu) sasaran strategis sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas P3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 disusun mengacu pada Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya. RKT tersebut telah ditindak lanjuti menjadi Penetapan Kinerja PK Dinas P3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

Tujuan, Sasaran dan Program Strategis Dinas P3AP2KB 2025 – 2026 tabel seperti dibawah ini:

Penetapan Kinerja (PK) Dinas P3AP2KB pada Tahun 2025, sebagai berikut:

<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target (%)</i>	<i>Program / Kegiatan</i>	<i>Anggaran (Rp)</i>
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	99,43%	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Keg. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp . 12.431.000
			Keg. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 131.392.200
	Cakupan keluarga tersosialisasi terkait peningkatan kualitas keluarga	3,36%	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Keg. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 145.035.000
			Keg. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 450.510.900
			Keg.Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan	Rp. 32.836.000

			Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Tersedianya dokumen data gender dan anak		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			Keg. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 33.905.000
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Keg. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 364.347.550
	Cakupan forum anak		Program Pemenuhan HAK Anak (PHA)	
			Keg. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 149.123.000
	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Keg. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RP. 70.697.500
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	61%	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
	Total Fertility Rate (TFR)		Keg. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp 79.920.300
			Keg. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 125.760.000
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19)		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	

	per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)		(KB)	
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49		Keg. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Loka	Rp 100.000.000
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		Keg. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp. 2.764.122.000
			Keg. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.698.640.850
			Keg. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp. 40.000.000
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		Keg. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 2.568.322.000

C. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Dinas P3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun 2025 sebesar Rp. **11.451.165.977** ,-terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Pegawai	Rp 1.674.573.019
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 9.153.300.758
3.	Belanja Hibah	Rp 581.392.200
3.	Belanja Modal	Rp 41.900.000
J u m l a h		Rp 11.409.265.977

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PROSES PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam pengukuran kinerja ini dilakukan dengan suatu metode atau proses yang meliputi yaitu:

1. Penetapan Indikator Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi yaitu:

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Penetapan Kinerja

Langkah selanjutnya adalah menetapkan indikator kinerja adalah menetapkan rencana tingkat capaian (*target*) kinerja yang diinginkan, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 atau melalui penyelarasan RKT dan PK Tahun Anggaran 2025 dengan perubahan Anggaran Tahun 2025.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja kegiatan, program dan sasaran melalui media berupa Formolir PPK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formolir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja yaitu:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dari pengukuran kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan program untuk mencapai sasaran SKPD / Unit yang telah ditetapkan.

Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam “Skala Pengukuran Ordinal” sebagai berikut :

No.	Skala Persentase Capaian Kinerja	Predikat
1	85 % - 100 %	Sangat berhasil
2	70 % - 84 %	Berhasil
3	55 % - 69 %	Cukup berhasil
4	<55 %	Tidak berhasil

B. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, Dinas P3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan untuk mencapai 2 (Dua) sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja..sasaran adalah 83,83%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh berhasilnya tingkat capaian sasaran. Seperti pada Tabel tingkat capaian seluruh sasaran sebagai berikut :

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	83,83
	Jumlah	83,83

C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas P3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai Program dan Kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh Sasaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Kinerja sasaran ini mencapai 83,83%. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 9 (Sembilan) program dan 16 (Enam Belas) kegiatan dengan 13 (Tiga Belas)

indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2,93	2,93	100
2	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100
3.	cakupan keluarga tersosialisasi terkait peningkatan kualitas keluarga	0,33	0,33	100
4	Tersedianya dokumen data gender dan anak	0	0	0
5	Cakupan forum anak	16	16	100
6	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100
7	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,84	0,64	76,19
8	Total Fertility Rate (TFR)	3,44	2,54	73,84
9	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	30,08	28,08	93,35
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	40,04	38,26	95,55
11	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	23	20	86,95
12	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	80	60	75
13	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	27,27	24,27	88,90
	Rata-rata			83,83

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kemampuan pengelolaan anggaran Dinas P3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun 2025 dapat disampaikan melalui tabel berikut ini.:

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata kinerja Realisasi pelaksanaan Anggaran mencapai **91,62%** atau termasuk sangat baik. Pencapaian Realisasi Anggaran tersebut memang belum sesuai dengan yang direncanakan yakni 100 %. Hal ini terjadi karena efisiensi Anggaran belanja yang dilakukan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
		Keg. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	0
		Keg. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	131.392.200
	Cakupan keluarga tersosialisasi terkait peningkatan kualitas keluarga	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
		Keg. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.145.300
		Keg. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	450.510.900
		Keg. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0
	Tersedianya dokumen data gender dan anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
		Keg. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.351.050
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		Keg. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	327.413.700
	Cakupan forum anak	Program Pemenuhan HAK Anak (PHA)	
		Keg. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	110.307.000
	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

	oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		
		Keg. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.501.700
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
	Total Fertility Rate (TFR)	Keg. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0
		Keg. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	125.220.780
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Keg. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Loka	200.000.000
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Keg. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.365.779.642
		Keg. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.329.246.850
		Keg. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	37.949.000
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Keg. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.112.898.096

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam usaha mewujudkan sasaran kinerja dari Dinas P3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 telah dilaksanakan **9 program strategis dan 14 Kegiatan dengan 13 Indikator**. Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab III tersebut diatas, maka dapat diambil simpul-simpul sebagai berikut:

Rata –rata Pencapaian Kinerja dari Sasaran adalah 83,83 %. Mengacu pada Skala Pengukuran Ordinal, maka pencapaian kinerja tersebut dikategorikan **Berhasil** karena sesuai dengan standar 70% -84%.

B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA

Rencana tindak strategis peningkatan kinerja sebagai upaya antisipatif dan korektif yang akan ditempuh dalam rangka perbaikan untuk mensiasati kegagalan atau kurang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran-sasaran pada tahun 2026 yaitu:

1. Meningkatkan disiplin kerja dan kapasitas kompetensi sumber daya aparatur pegawai melalui pelaksanaan bimbingan teknis yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kerja aparatur pegawai.

Demikian LKIP ini, semogadapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pelayanan kemasyarakatan ke depan.

Tambolaka, 22 Januari 2026



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS P3AP2KB
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2,93
2		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100
3		Cakupan keluarga tersosialisasi terkait peningkatan kualitas keluarga	0,33
4		Tersedianya dokumen data gender dan anak	0
5		Cakupan forum anak	16
6		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100
7		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,84
8		Total Fertility Rate (TFR)	3,44
9		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	30,08
10		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	40,04
11		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	23
12		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	80
13		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	27,27

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD/Unit Kerja Mandiri : **DINAS P3AP2KB**
Tahun Anggaran : **2025**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2,93	2,93	100
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100
	Cakupan keluarga tersosialisasi terkait peningkatan kualitas keluarga	0,33	0,33	100
	Tersedianya dokumen data gender dan anak	0	0	0
	Cakupan forum anak	16	16	100
	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,84	0,64	76,19
	Total Fertility Rate (TFR)	3,44	2,54	73,84
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	30,08	28,08	93,35
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	40,04	38,26	95,55
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	23	20	86,95
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	80	60	75
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	27,27	24,27	88,90
	Rata-rata			83,83

Jumlah Anggaran Program Kegiatan Tahun 2025: Rp. 11.451.165.977

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025: Rp. 10.491.298.176